

BAB II

TOKOH MASYARAKAT TIONGHOA DAN SIKAP POLITIK

A. Tokoh Masyarakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987, Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 1987). Kedudukan tokoh masyarakat diperoleh individu karena pengetahuannya, kebijaksanaan budi pekertinya, dan kesuksesannya dalam menjalani kehidupan di Masyarakat.

Pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimiliki Tokoh Masyarakat biasanya menjadi panutan bagi orang-orang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu aktifitas, kecakapan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tokoh Masyarakat merupakan orang yang dihormati, disegani dan dihargai (Porawouw, 2016).

Mempunyai peran yang sangat penting bagi Tokoh Masyarakat. Sebab, pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau sekelompok orang lain sesuai dengan keinginan dirinya (Budiardjo M. , 2008).

Ada beberapa peran masyarakat antara lain adalah sebagai pengendali sosial, penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Selain itu tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Tokoh masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan, bimbingan, motivasi serta pengarahan pada masyarakatnya (Rosidin, 2020).

(Tanto, 2012) mengatakan bahwa tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam berbagai bidang kehidupan di

masyarakat. Hal yang demikian tentunya harus dimiliki pula pada mereka yang ditokohkan oleh masyarakat. Selain itu menurut Tanto, banyak alasan mengapa seseorang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat, diantaranya adalah karena pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian, keturunan, dan lain-lain.

Tokoh masyarakat juga berperan sebagai pemberi dukungan. Dukungan Tokoh Masyarakat dibedakan menjadi dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informatif. Dukungan emosional diindikasikan dengan ungkapan empati, kepedulian dan perhatian. Dukungan penghargaan diindikasikan dengan ungkapan hormat dan pemberian dorongan untuk maju. Dukungan instrumental diindikasikan dengan memberikan bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan informatif diindikasikan dengan pemberian nasehat, petunjuk, saran dan umpan balik (M. A. Akbar, 2015).

B. Masyarakat Tionghoa

Masyarakat Tionghoa yang pada awalnya datang ke Negara Indonesia dengan tujuan untuk berdagang yang dikenal dengan panggilan orang Tiongkok oleh penduduk Nusantara merupakan bagian dari cerita sejarah masyarakat Indonesia. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda kehidupan orang-orang Tionghoa ini juga masih terlihat sebagai pedagang bahkan sampai pada saat sekarang ini serta mereka umumnya berdomisili di pusat-pusat keramaian atau di kota-kota besar (Suharyanto, 2014).

Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan hasil dari keturunan bangsa Tiongkok yang merantau ke Indonesia kemudian menetap dan memiliki keturunan, baik dengan sesama orang Tiongkok, maupun dengan melakukan pernikahan campur dengan etnis pribumi. Dengan dasar pemahaman bagaimana perubahan budaya akan memengaruhi lingkungan lokal dan aset dan kapasitas masyarakat (Huq dan Reid, 2007).

Menurut Undang-Undang Dasar Masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia statusnya resmi sebagai warga Negara Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 26 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara".

Sebagaimana menurut (Groeneveldt, 2009) "Orang-orang Tiongkok peranakan yang tinggal menetap turun temurun di Indonesia, sejak masa reformasi sekarang ini, telah berhasil memperjuangkan agar tidak lagi disebut sebagai orang Tiongkok, melainkan disebut sebagai orang Tionghoa".

Di samping itu, karena alasan Hak Asasi Manusia dan sikap non-diskriminasi, sejak masa pemerintahan Presiden B.J Habibie melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparat pemerintah telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah Pribumi dan Non-Pribumi untuk membedakan penduduk keturunan China dengan warga Negara Indonesia pada umumnya.

Orang-orang Tionghoa mempunyai latar belakang kehidupannya datang ke Indonesia sebagai pedagang. Tradisi itu masih mereka pegang teguh secara turun temurun. Aktif di ekonomi, menggapai usaha-usaha dan bisnis menjadi pilihan masyarakat Tionghoa. Orang Tionghoa juga mengatakan di bidang perekonomian lebih menjanjikan visi dan misi yang lebih jelas dengan ungkapan kalimat bukan karya kata tetapi karya nyata (Suharyanto A. , 2014).

Selain itu, Masyarakat Tionghoa di Indonesia cenderung hidup berkelompok di suatu wilayah tertentu yang selalu mereka sesuaikan dengan pola hidup mereka. Masyarakat Tionghoa selalu hidup dan berdomisili di daerah keramaian yaitu daerah perkotaan. Pernyataan ini dianggap tepat,

karena disesuaikan dengan pola hidup mereka sehari-hari. Kehidupan masyarakat Tionghoa yang selalu cenderung aktif dan menggantungkan hidupnya di bidang ekonomi adalah suatu alasan yang tepat dan mendasar. Ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka dulu pada saat masuk ke Indonesia (Suharyanto A. , 2014).

Kota Palembang juga dikenal sebagai kota pendatang khususnya dari etnis Tionghoa, masyarakat pendatang etnis Tionghoa terhadap lingkungan yang meliputi cara bertahan hidup dan perkembangan budaya, bisnis dan keturunannya berdasarkan pengamatan lingkungan, sosial, dan religi (Harahap, 2020).

Dalam konteks lokal, masyarakat Tionghoa saat ini adalah kelompok Peranakan yang merupakan keturunan dari generasi awal leluhurnya yang pertama kali migrasi, Misalnya di Kampung Kapitan Kota Palembang, Sumatra Selatan. Etnis Tionghoa yang hidup sekarang ini merupakan generasi dan Peranakan Etnis Tionghoa. Dengan sentimen pada Tionghoa yang masih berkembang hingga saat ini, bagaimana Etnis Tionghoa itu diwariskan dan ditampilkan oleh etnis Tionghoa lokal yang masih tinggal di pecinan menarik untuk diteliti (Mahmudi, 2020).

C. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam hal ini Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat (Anggara, 2018).

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Di kutip (Agustino, 2008).

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2000).

Richard Rose juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu (Winarno, 2007).

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, (Wahab, 2008) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.

- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

D. Sikap Politik

1. Sikap

(Mar'at, 1992) mengemukakan definisi sikap yakni bahwa "Sikap sebagai derajat atau tingkat kesesuaian seseorang terhadap objek tertentu". Mar'at juga mendefinisikan "Sikap merupakan proses sosialisasi dimana seseorang akan bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya".

Mar'at dalam bukunya "Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya", mengutip pendapat Hovland, Janis, & Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada Perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan

proses berikutnya. Komunikasikan akan mengolah dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap (Mar'at, 1991).

Kemudian oleh para psikolog, sikap dikonsepsikan sebagai alasan perbedaan individual. Sikap akan menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang W. J. Thomas (Ahmadi, 2007) mengemukakan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata atau yang akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap merupakan konsep yang membantu memahami tingkah laku. Sejumlah perbedaan tingkah laku dapat merupakan pencerminan atau manifestasi dari sikap yang sama.

Sikap merupakan sebuah pola yang dapat terbentuk melalui pergaulan, misalnya seseorang yang hidup dalam keluarga disiplin, akan cenderung disiplin juga (Gerungan, 2009).

Suatu hal yang penting dalam sikap politik masyarakat, G.W. Allport menjelaskan sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Selanjutnya pengertian tersebut diperjelas oleh Widayatun bahwa sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya (Widayatun, 1999).

(Rakhmat, 1992) mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Kedua, sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Ketiga, sikap lebih menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, sikap timbul dari pengalaman: tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.

Berkowitz mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Pengertian sikap memang beragam, maka oleh para ahli Psikologi Sosial mutakhir mengklasifikasikan pemikiran tentang sikap terdapat dua pendekatan (Saifuddin, 2013, p. 5).

1. Pembentukan dan Perubahan Sikap

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu, Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Interaksi sosial tersebut dapat membuat individu dapat bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi, atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu (Saifuddin, 2013, p. 30).

Sikap menimbulkan stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial kebudayaan misalnya keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial yang tertentu, misalnya ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Faktor-faktor yang perubahan sikap intern faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap terbentuk dalam hubungan dengan suatu objek, orang, kelompok, lembaga, nilai, melalui hubungan antar individu, hubungan di dalam kelompok, komunikasi surat kabar, buku, poster, radio, televisi, dan

sebagainya. Sementara orang berpendapat bahwa mengajarkan sikap adalah merupakan tanggungjawab orangtua atau lembaga-lembaga keagamaan. Hakikat dari tujuan pendidikan adalah mengubah sikap anak didik ke arah tujuan pendidikan. Hubungan antara sikap dan tingkah laku merupakan adanya hubungan yang erat antara sikap dan tingkah laku didukung oleh pengertian sikap yang mengatakn bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak.

2. Ciri-ciri dan Fungsi Sikap

(Ahmadi, 2007, p. 164) Mengemukakan bahwa sikap akan menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadiankejadian. Ciri-ciri sikap yang pertama yaitu sikap dapat dipelajari.

Selain ciri-ciri, sikap juga memiliki fungsi sikap dapat dibagi menjadi empat golongan. Pertama, sikap berfungsi merupakan alat untuk menyesuaikan diri. Sikap merupakan sesuatu yang bersifat komunikatif sehingga mudah menjadi milik bersama. Kedua, Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku yang dapat dimiliki secara spontan. Ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengukur pengalaman-pengalaman seseorang dari luar maupun dari dalam diri seseorang. Keempat, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian yang dapat mencerminkan pribadi seseorang. Sehingga sikap dapat melihat objek-objek tertentu (Ahmadi, 2007, p. 165).

3. Struktur Sikap

Struktur sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif merupakan persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen kognitif berisi persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Komponen kognitif ini dapat dipahami bahwa komponen kognitif berisi pengetahuan, pendapat seseorang akan suatu

objek atau fenomena, dan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum bahwa komponen afektif merupakan perasaan yang timbul dari seseorang terhadap suatu objek. Komponen perilaku atau konatif dalam struktur sikap merupakan kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan suatu objek persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu (Saifuddin, 2013, p. 31).

4. Tingkatan Sikap

Menurut (Notoatmodjo, 2010) Sikap terdiri dari berbagai tingkatan antara lain:

- a. Menerima (receiving). Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).
- b. Merespon (responding). Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut.
- c. Menghargai (valuing). Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah.
- d. Bertanggung jawab (responsible). Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

2. Politik

Politik ialah bermacam-macam kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan

publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution) (Budiardjo M. , 2008).

Menurut Rod Hague politik adalah kegiatan yang menyangkut bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggotaanggotanya (politics is the activity by which group reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members) (Budiardjo M. , 2008, p. 16).

Menurut Andrew Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen, peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (politics is the activity through wich a people make, preserve and amend the general rules under which they live and such is inectricaly linked to the phenomen of conflict and cooperation) (Budiardjo M. , 2008).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) ialah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (allocation) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (power) serta wewenang (authority). Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Konsep politik yang pertama ialah negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kedua, kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Karl W. Deutsch berpendapat bahwa politik adalah

pengambilan keputusan melalui sarana umum (politics is the making of decisions by public means). Ketiga, keputusan (decision) ialah hasil dari membuat pilihan diantara beberapa alternatif. (Budiardjo M. , 2008, p. 20).

(Sastroatmodjo, 1995) mengemukakan bahwa sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Berdasarkan sikap politik akan dapat diperkirakan perilaku politik apa yang akan muncul. Sikap pada umumnya bersifat relatif menetap atau tidak mudah berubah. Istilah sikap politik erat hubungannya dengan political efficacy adalah istilah yang sering digunakan.

(Cottam, 2012) mengatakan bahwa salah satu hal terpenting dalam penelitian sikap politik adalah adanya asumsi bahwa sikap seseorang akan menentukan perilaku politik.

Mengemukakan bahwa konsep sikap dapat dihubungkan dengan politik, sehingga sikap dapat dilakukan oleh individu atau berbagai kelompok. Sikap politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang atau kelompok untuk mengahadai, merespon masalah-masalah politik yang terjadi yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk.

Bentuk sikap dapat dicontohkan misalnya saat ada ada kebijakan yang dikeluarkan pihak yang berwenang akan menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa dan ada pula yang lebih suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa. Sudijono mengatakan bahwa diam juga dapat dikatakan sebagai sikap politik, sebab dengan diam tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penghayatan terhadap objek atau persoalan tertentu yang ada disekitarnya. Diam dapat berarti setuju, dapat berarti netral,

dapat berarti menolak, akan tetapi merasa tidak berdaya untuk membuat pilihan.

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga akan bersifat positif. Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukkan bersifat negatif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari aktor sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang hidup di lingkungan aktor sikap politik tersebut.

E. Teori Sikap Politik

Berkowizd menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek adalah berupa perasaan mendukung atau tidak mendukung (Saifuddin, 2013, p. 3). Adapun 3 (tiga) komponen sikap antara lain:

a. Komponen Kognitif

Berisi kepercayaan seseorang mengenai obyek sikap. Kepercayaan datang dari apa yang dilihat atau apa yang telah diketahui. Berdasarkan apa yang telah terlihat itu kemudian terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sikap atau karakteristik umum suatu obyek. Sesekali kepercayaan terbentuk, akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dan apa yang tidak dapat diharapkannya dari obyek tertentu.

b. Komponen afektif

Menyangkut masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Secara umum, komponen ini bisa disamakan dengan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Reaksi emosional yang merupakan komponen afektif banyak ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai benar bagi obyek termaksud.

c. Komponen konatif

Menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya. Bagaimana orang akan berperilaku terhadap situasi tertentu dan stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut, kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkannya dalam bentuk perilaku terhadap obyek. Komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya dapat dilihat secara langsung saja tetapi mengikuti pula bentuk-bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang (Saifuddin, 2013, p. 17).